

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

Pedoman Wawancara Kepala Kantor Kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa

1. Sejak kapan Bapak menjabat sebagai camat di kantor kecamatan Maronge ?
2. Bagaimana respon atau partisipasi masyarakat kecamatan Maronge terhadap upaya bapak menerapkan prinsip-prinsip good governance?
3. Pada pelayanan publik yang di laksanakan di kantor kecamatan Maronge, Apakah sudah menerapkan prinsip Transparansi? Misalnya keterbukaan informasi.
4. Apakah pelayanan publik yang di laksanakan di kantor kecamatan Maronge sudah di terapkan berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) ?
5. Apakah di kantor kecamatan Maronge sering di adakan musyawarah dan mufakat dalam mengambil keputusan ?
6. Apakah seluruh masyarakat kecamatan Maronge di berikan pelayanan publik yang sama secara adil ?
7. Apakah pelayanan publik yang di laksanakan di kantor kecamatan Maronge sudah berjalan secara Efektif dan Efisien ?
8. Apakah ada laporan kinerja setiap staf kantor kecamatan Maronge ?
9. Dalam melaksanakan prinsip- prinsip good governance, Bapak memiliki strategi yang khusus ?
10. Apa saja yang jadi faktor penghambat pelaksanaan prinsip good governance di kecamatan Maronge ?

**Pedoman Wawancara Pegawai Kantor Kecamatan
Maronge Kabupaten Sumbawa**

1. Sejauh mana pemahaman Bapak / Ibu tentang prinsip Good governance ?
2. Apakah yang Bapak / Ibu persiapkan sebelum melaksanakan kegiatan pelayanan publik ?
3. Apakah kantor kecamatan Maronge memiliki standar operasional pelayanan ?
4. Apakah Bapak / Ibu telah melakukan pelayanan dengan tepat dan cepat?
5. Apa saja faktor pendukung pelaksanaan pelayanan publik di kantor kecamatan Maronge ?
6. Apakah faktor penghambat dalam pelaksanaan pelayanan publik di kantor kecamatan Maronge ?

**Pedoman Wawancara Masyarakat Kecamatan
Maronge Kabupaten Sumbawa**

1. Menurut Bapak / Ibu, Bagaimana pelayanan yang di berikan oleh pegawai di kantor kecamatan Maronge, apakah sudah benar dan tepat?
2. Apakah pegawai di kantor kecamatan Maronge mampu dan memiliki jumlah pegawai yang cukup untuk melayani masyarakat sampai menyelesaikan kepentingannya ?
3. Apakah pegawai dari kantor kecamatan Maronge mampu melayani masyarakat dengan cepat dan tidak mendahulukan kepentingan pribadi dan keluarga?
4. Bagaimana sikap pegawai kantor kecamatan Maronge dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ? yang berkaitan dengan sopan, santun dan keramah tamahannya?
5. Apakah pegawai kantor kecamatan Maronge cepat tanggap terhadap apa yang di butuhkan oleh masyarakat ?
6. Apakah pegawai di kantor kecamatan Maronge memberikan kemudahan dalam proses pelayanan ?
7. Menurut Bapak / Ibu, Bagaimanakah ke disiplin pegawai kantor kecamatan Maronge dalam melakukan proses pelayanan terhadap masyarakat ?
8. Apakah Bapak / Ibu di berikan pelayanan secara adil di kantor kecamatan Maronge ?
9. Apakah Bapak / Ibu pernah melakukan komplek mengenai kinerja pegawai yang ada di kantor kecamatan Maronge ?
10. Apa saja saran yang dapat Bapak / Ibu berikan agar kedepannya bisa menjadi lebih baik?

Lampiran 2 : Dokumentasi Lapangan

Wawancara dengan Bapak Ismail selaku Camat Maronge pada 3 April 2023



Wawancara dengan Ibu Deli selaku Staf Pelayanan pada 5 April 2023



Wawancara dengan Bapak Ibrahim selaku Kasi Pelayanan pada 4 April 2023.



Wawancara dengan Bambang masyarakat pada 7 April 2023



Wawancara dengan Ainun selaku masyarakat pada 9 April 2023



Wawancara dengan Bapak I Made selaku Kasi Trantib pada 11 April 2023



Wawancara dengan Dini selaku Masyarakat pada 15 April 2023



Wawancara dengan Irwansyah selaku Kasi Ekbang pada 17 April 2023



Wawancara dengan Heri Susanto selaku Kasi Kepegawaian pada 18 April 2023



Wawancara dengan Emi selaku masyarakat pada 19 April 2023



Wawancara dengan Yuni selaku masyarakat pada 20 April 2023



Wawancara dengan Azis selaku masyarakat pada 26 April 2023



Pemberian pelayanan dari pihak Kantor Kecamatan Maronge pada
3 April 2023



Pemberian pelayanan dari pihak Kantor Kecamatan Maronge pada
4 April 2023



Buku Tamu Kantor Kecamatan Maronge

NO	Tanggal	Nama / Alamat	KEPERINTAH	TANDA TANGAN
1	3-1-2023	H. Sidiqul Ridwan Kendari	C NRS	
2	9-1-2023	Syaiful Ahuas		
3		M. Fauzi	Kelompok PKK Kec...	
4	9-1-2023	Rudiana BENTENG SAMPURAN	Kepala Desa KORU BERKAWAN PUSKESMAS DAN PU KAWAN BERKAWAN ANEGARA PKK	
5	9-1-2023	IPRAS CUF/AD		
6	9-1-2023	Husni	Anggota PKK Kec. Maronge	
7	9-1-2023	Hafidzuddin Hafidz	Anggota PKK Maronge	
8	9-1-2023	M. Nurul KEM. PANGKASARI MARTUJI		
9	9-1-2023	OSMA ILMAT TO	PAKSI KEMUK MARTUJI	
10	9-1-2023	TRISNA S. IS	Calon Ketua	
11	10-1-2023	Utman	Calon	

NO	Tanggal	Nama / Alamat	KEPERINTAH	TANDA TANGAN
12	20-01-2023	Muhammad Anas Zainal Abidin Roni Nurhasanah FIRDAUS	MARJANAH KEM. PANGKASARI MARTUJI	
13	21-02-2023	Ruan Komarudin Wahid al Chams MISTRI	Kelompok Pengorgan Program pembangunan SPPD	
14	21/02/2023	Syaiful KEM. PANGKASARI MARTUJI	SPPD	
15	23/02-2023	1. Saifulhakim 2. Lina Kurniawati 3. Hidayatullah 4. Agus Salwan SAP	SPPD	
16	20-02-2023	1. Tolu Lelano 2. Syahri Rizwan 3. LESTIA	REPERKORAN CEMAT KEM. PANGKASARI MARTUJI	
17	20-02-2023	Muhammad Anas KEM. PANGKASARI MARTUJI	REPERKORAN CEMAT KEM. PANGKASARI MARTUJI	
18	20-02-2023	Fery/PROPEK US KEM. PANGKASARI MARTUJI	KELUA PRONG KEM. PANGKASARI MARTUJI	

Lampiran 3 : Kartu Bimbingan Skripsi


UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi ♦ Administrasi Publik ♦ Administrasi Bisnis ♦ Ilmu Komunikasi
 ♦ Magister Administrasi Publik ♦ Magister Ilmu Komunikasi ♦ Doktor Ilmu Administrasi
 Gedung F 101 Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118)
 Telp. 031-5991742, 5931800 psw. 159 email : fisp@untag-sby.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Listia Afliya
 NBI : 1111900210
 Program Studi : Administrasi Negara
 Dosen Pembimbing I : Dr. Achluddin Ibnu Rochim, SH., M.Si
 Dosen Pembimbing II : Drs. M. Kendry Widiyanto, M.Si
 Judul Skripsi : Penerapan prinsip good Governance dalam pelayanan publik di kantor Kecamatan Maronge kabupaten Sumbawa

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Pembimbing	
			Paraf Dospem 1	Paraf Dospem 2
1	3/3-23	Prinsip (Simpul)		
2	7/5-23	Bab I, II, III, IV, V		
3		Bab I & Bab III ACC		
4		Silahkan Riset Lapangan		
5	24/5-2023	Bab I, II, III, IV, V		
6	28/5-2023	Bab I - IV ACC Hub. Peng. I		
7	16/5-03	Bab I & V ACC		



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi : ♦ Administrasi Publik ♦ Administrasi Bisnis ♦ Ilmu Komunikasi
 ♦ Magister Administrasi Publik ♦ Magister Ilmu Komunikasi ♦ Doktor Ilmu Administrasi

Gedung F 101 Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118)

Telp. 031-5991742, 5931800 psw. 159 email : fisip@untag-sby.ac.id

No.	Tanggal	Saran/Perbaikan	Pembimbing	
			Paraf Dospem 1	Paraf Dospem 2
8	7/5-2023	Bab I & II KCE		
9	17/5-2023	Lampiran KCE		

Catatan:

1. Kartu Bimbingan dibawa saat bimbingan
2. Kartu bimbingan diisi oleh Dosen Pembimbing

Bimbingan dinyatakan telah selesai
 Tanggal : 29 Mei 2023

Dosen Pembimbing I,

Achluddin Ibrahim-R

Dosen Pembimbing II,

Aliyanti

Lampiran 4 : Artikel Ilmiah

PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR KECAMATAN MARONGE KABUPATEN SUMBAWA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

Listia Afliya

Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

E-mail : listiaafliya85@gmail.com

Dr.Achluddin Ibnu Rochim,SH.,M.Si

Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

E-mail : didin@untag-sby.ac.id

Drs.M.Kendry Widiyanto.,MSi.

Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

E-mail : kenronggo@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Dalam melaksanakan pelayanan publik butuh adanya penerapan prinsip Good governance. Konsep Good governance ada di karenakan kurangnya efektifitas kinerja aparatur pemerintah yang selama ini di percaya selaku penyelenggara urusan publik. Good governan berasal dari induk bahasa Eropa yakni Gubernare dan di adopsi ke dalam kedalam bahasa inggris jadi Govern dengan makna Sternatau atau umum di sebut dengan menyetir atau mengendalikan.

Berkaitan dengan Judul penelitian yang saya lakukan adalah penerapan prinsip Good governance dalam pelayanan publik di kantor Kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa, dengan tujuan mengetahui penerapan prinsip-prinsip Good governance, faktor pendukung dan hambatan - hambatannya di dalam pelayanan publik.

Penelitian ini di laksanakan di kantor Kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa dengan memakai metode penelitian Kualitatif Deskriptif ,

pengumpulan data di lakukan dengan cara wawancara, Observasi , dan dokumentasi. Sedangkan narasumber dalam penelitian ini yaitu Camat , staf / pegawai Kantor Kecamatan Maronge, dan masyarakat Kecamatan Maronge.

Hasil penelitian menyatakan jika Prinsip Good governance di kantor Kecamatan Maronge secara umum berjalan cukup baik pada indikator Responsivitas, Efektivitas dan Efesien, Akuntabilitas. Sedangkan dua indikator lainnya yaitu Keadilan dan Transparansi belum maksimal, karena di dalam wawancara dengan masyarakat masih ada pegawai yang kurang disiplin, ada kekeliruan dalam pelayanan dan kurang transparan atau terbuka dalam memberikan informasi.

Kata Kunci : Good governance, Pelayanan Publik, kantor Kecamatan Maronge.

ABSTRACT

In carrying out public services, it is necessary to apply the principles of good governance. The concept of good governance arises due to the ineffectiveness of the performance of government officials who have been trusted as administrators of public affairs. Good governance comes from the main European language, namely Gubernare and was adopted into English to become Govern with the meaning Stern or or commonly referred to as driving or controlling.

Related to the title of the research that I did was the application of the principles of good governance in public services at the Maronge District office, Sumbawa Regency, with the aim of knowing the application of the principles of good governance, supporting factors and obstacles in public services.

This research was carried out at the Maronge District office, Sumbawa Regency using a descriptive qualitative research method, data collection was carried out by means of interviews, observations, and documentation. Meanwhile, the sources in this study were the Camat, staff/employees of the Maronge District Office, and the people of Maronge District.

The results of the study show that the principles of good governance in the Maronge sub-district office generally work quite well on the indicators of responsiveness, effectiveness and efficiency, and accountability. While the other two indicators, namely Justice and Transparency, have not been maximized, because in interviews with the community there were still employees who lacked discipline, had made mistakes in service and were not transparent or open in providing information.

Keywords: Good governance, Public Service, Maronge District office

A. PENDAHULUAN

Sekitar tahun 1990, konsep *good governance* mulai dikenal di Indonesia. Pada masa ini, sejumlah wacana penting mulai terbentuk dalam konteks berbagai dialog, bincang-bincang, penelitian, serta seminar yang diselenggarakan baik di lingkup pemerintah ataupun lintas masyarakat, termasuk kalangan akademisi. Sampai krisis moneter dan krisis kepercayaan memuncak dengan perubahan yang signifikan pada tahun 1998, situasinya sebagian besar tetap tidak berubah. Di Indonesia, berbagai macam proyek pemikiran ke depan untuk mendorong tata pemerintahan yang baik, akuntabilitas, dan peningkatan partisipasi telah dilaksanakan.

Sistem tata kelola yang baik" yakni istilah yang telah dipakai guna mencerminkan konsep ini. Lebih lanjut ditegaskan jika yang diartikan istilah "governance" adalah proses penyelenggaraan kewenangan negara dalam penyelenggaraan pelayanan dan barang publik. Gagasan "baik" dalam frasa "tata pemerintahan yang baik" dapat mengacu pada dua hal yang berbeda: kedua, nilai-nilai yang mendukung keinginan masyarakat umum dan cita-cita yang mungkin membantu masyarakat menjadi lebih baik dalam mencapai tujuan pemerintah (nasional). seperti otonomi, pembangunan, kelangsungan hidup jangka panjang, dan keadilan sosial; pada aspek operasional pemerintahan dalam melaksanakan kewajibannya guna mencapai tujuan tersebut dengan efektif serta efisien dan kemudian, aspek fungsional pemerintahan yang terkait dengan pencapaian tujuan tersebut. Istilah "*good governance*" atau "tata kelola yang baik" mengacu pada praktik terbaik ini. Oleh karena itu, *good governance* dapat dicirikan selaku pelaksanaan pemerintahan yang kuat serta bertanggung jawab yang selain efektif dan efisien, juga kuat dan akuntabel. Hal ini dapat dicapai dengan menjaga sinergi konstruktif yang ada antara kegiatan produktif negara, sektor swasta, dan masyarakat.

Sejak pertengahan tahun 2000-an, isu-isu yang berkaitan dengan tata kelola publik telah menarik banyak perhatian di Indonesia, khususnya di media. Sesuai dengan amanat keputusan iMenteri Koordinator Bidang Perekonomian iRepublik Indonesia iNo.KEP-49/M.EKON/TAHUN iTahun

2004, dibentuklah Komite Nasional Kebijakan Pemerintah (KNKG) (No. KEP-49/M.EKON/TAHUN 2004) 30 November 2004, dibentuk oleh Komite Nasional Kebijakan Pemerintah (KNKG), 2004)

KNKG Pedoman Umum Good Public Governance diterbitkan pada tahun 2008 dengan tujuan sebagai acuan penyelenggaraan good governance oleh lembaga negara dan organisasi pemerintahan di Indonesia, antara lain dalam rangka meningkatkan efisiensi penyelenggaraan negara dan meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab sendiri dalam rangka memajukan dan mengutamakan kesejahteraan. Ini dilakukan untuk memenuhi sejumlah tujuan, termasuk yang tercantum di atas.

Kualitas layanan akan menentukan tingkat kepuasan yang dialami pengguna atau penerima layanan lainnya, khususnya masyarakat. Penyediaan layanan publik berkualitas tinggi, yang merupakan sebuah bentuk keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, adalah sebuah taktik yang dapat digunakan untuk memberantas aktivitas ilegal. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pelayanan dan keberadaan manusia tidak dapat dipisahkan, sehingga pelayanan yang ditawarkan oleh instansi pemerintah memerlukan konsentrasi dan fokus yang maksimal. Selain itu, penelitian tentang layanan publik sangat penting, mengingat masyarakat pada umumnya memiliki kebutuhan yang signifikan terhadap layanan tersebut. Indonesia sekarang ini ada pada kondisi yang sulit, yang mungkin dapat didiskusikan terkait dengan keadaan pelayanan publik negara tersebut.

Penyediaan pelayanan publik di zaman modern telah berkembang menjadi masalah strategis yang semakin penting. Efeknya cukup luas, mulai dari kehidupan ekonomi dan meluas ke kehidupan politik, kehidupan sosial, kehidupan budaya, dan elemen kehidupan lainnya. Hal ini disebabkan pelayanan publik di Indonesia condong tetap dan tidak ada pembangunan yang dilakukan. Untuk itu diperlukan penerapan tata kelola yang unggul guna mencapai tujuan organisasi yang baik mengingat kondisi pelayanan publik yang ada. Hal ini terjadi karena tata kelola yang baik sangat diperlukan. Untuk berhasil mencapai tujuan tersebut, Akses terhadap sumber daya manusia ialah unsur yang sangat penting, yang didefinisikan sebagai individu yang memiliki karakteristik dan pola pikir yang terkait dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.

Kecamatan di Indonesia adalah bagian dari daerah yang dikendalikan oleh kabupaten atau kota, bukan oleh pemerintah nasional. Seorang camat

berfungsi sebagai kepala administrasi sebuah kecamatan, yang terdiri dari banyak desa dan pemukiman yang lebih kecil. Sebagai badan teknis pemerintahan, kecamatan memberikan bantuan kepada pemerintah kota atau daerah, maupun pemerintah kabupaten, dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk urusan perizinan dan nonperizinan. Selain itu, sesuai dengan Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), terdapat tiga prasyarat yang harus dipenuhi sebelum pelayanan dapat diberikan. Pendelegasian, standar pelayanan, dan Ada beberapa uraian tugas perangkat kecamatan yang wajib dipenuhi oleh kecamatan. Salah satu kebutuhan lainnya adalah penyediaan sarana dan prasarana yang bisa menunjang implemmentasi pelayanan administrasi kecamatan terpadu.

Kabupaten Sumbawa terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kecamatan Maronge ialah salah satu dari total 24 kecamatan yang ada di Kabupaten Sumbawa Sekitar 10.507 jiwa tinggal di Kecamatan Maronge yang terletak di bagian timur Kabupaten Sumbawa secara keseluruhan terdiri dari 24 kecamatan, 8 kelurahan, dan 157 desa dengan luas 6.643,98km², dan kecamatan Maronge merupakan salah satu kecamatan tersebut.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Good governance atau pemerintahan yang baik yakni sebuah penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid serta bertanggung jawab yang senada terhadap prinsip demokrasi serta pasar yang efisien, untuk menghindari kesalahan penempatan dana investasi serta untukantisipasi korupsi baik secara politik ataupun administratif melaksanakan disiplin anggaran serta penciptaan legal serts *political framework* untuk tumbuhnya aktivitas usaha.

Konsep dari *good governance* sendiri yakni guna menciptakan sebuah sistem yang menghasilkan kebijakan bertanggung jawab. Dimana tanggung jawab ini dapat dipikul bersama serta dapat menguntungkan seluruh pihak. tanpa terkecuali serta tanpa memihak.

Sementara **World Bank** mendefibisikan *good governance* selaku manajemen pemerintah yang solid, akuntabel, berlandaskan dengan prinsip

pasar yang efisien, bisa mencegah korupsi baik secara politis ataupun administratif.

Terdapat sejumlah prinsip Good Governance menurut UNDP(United Nation Development Programme dalam susanto & Anggraini, 2019) yaitu:

1.Partisipasi

Partisipasi masyarakat suatu organisasi keberadaan manusia yang berinteraksi menurut sistem konvensi tertentu yang berkelanjutan dan dihubungkan oleh perasaan identitas bersama disebut sebagai imasyarakat. Seluruh warga negara berhak guna berpartisipasi pada pengambilan keputusan, baik dengan langsung ataupun dengan lembaga perwakilan yang mencerminkan kepentingan mereka dalam masyarakat yang demokratis. Keterlibatan berbasis luas ini berlandaskan pada kebebasan berkumpul dan berbicara, serta kemampuan guna berkontribusi secara produktif dalam percakapan.

Penjelasan pada PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Pasal 127 angka 2 (Sandiasa & Widnyani, 2017) mengungkapkan jika pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan oleh pemerintah daerah:

- a. Keterlibatan masyarakat pada perencanaan serta pembangunan desa yang dijalankan oleh desa atas inisiatif sendiri sangat dianjurkan.
- b. iPengembangan irencana idan ikegiatan ipembangunan idesa ijangka ipanjang iyang imemanfaatkan isumber idaya ialam idan isumber idaya imanusia iyang iada idi imasyarakat.
- c. Rencana pembangunan desa harus didasarkan pada prioritas, potensi, dan nilai-nilai yang diidentifikasi oleh kearifan kolektif masyarakat.
- d. Orang miskin, penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, dan kelompok kurang beruntung lainnya harus mempertimbangkan kepentingan mereka ketika merencanakan dan menganggarkan.
- e. Siapkan kerangka keterbukaan dan akuntabilitas untuk memandu pelaksanaan pemerintah desa dan inisiatif pembangunan desa di komunitas Anda.
- f. Memanfaatkan lembaga masyarakat lokal serta lembaga adat adalah penting.

- g. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan desa didorong melalui diskusi desa yang dilakukan secara rutin.
- h. Peningkatan kualitas dan kapabilitas SDM di masyarakat desa sedang direncanakan dan dilaksanakan.
- i. Bantuan kepada masyarakat setempat dalam jangka panjang.
- j. Terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa serta kegiatan pembangunan yang dijalankan secara partisipatif oleh masyarakat desa, Anda akan mengawasi dan memantau pelaksanaannya.

2. Tansparansi

Transparasi merupakan strategi keterbukaan dalam pengawasan, sedangkan yang di maksud disampaikan kepada masyarakat luas melalui berbagai saluran, pengungkapan informasi di yakini dapat menciptakan persaingan politik yang sehat dan toleran dan pada keputusan kebijakan di buat berlandaskan informasi yang tersedia untuk umum. Krina (2003:13) dalam Julita & Abdullah, (2020) mendefinisikan transparansi selaku sebuah konsep yang menjamin jika setiap orang memiliki akses atau kebebasan guna mendapat informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, yakni pengetahuan tentang proses penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan hasil yang di capai. Aliran informasi yang bebas adalah dasar dari transparasi, seluruh prosedur, lembaga dan informasi pemerintah harus mudah di akses oleh mereka yang berkepentingan. Informasi yang tersedia harus memadai untuk di pahami dan di pantau oleh semua pihak. Hal tersebut di garis bawahi di dalam pasal 127 angka 2 , sebagai bentuk transparasi sebagai berikut : “ Membangun sistem transparasi dan akuntabilitas pada penyelenggaraan pemerintahan dan pemebagunann ”.

Transparasi juga membuktikan kesediaan pemerintah guna bersikap transparan pada pemberian informasi mengenai tindakan pengelolaan sumber daya publik terhadap para pihak yang menghendaki informasi tersebut.

- 3. Kepastian Hukum (Rule of law): Kerangka aturan hukum serta aturan undang-undang harus berkeadilan, ditegakkan serta dipatuhi dengan utuh, khususnya aturan hukum mengenai hak asasi manusia.
- 4. Berorientasi pada kesepakatan (consensus Orientation): Pemerintah yang baik akan berperan selaku penengah untuk sejumlah kepentingan yang tidak sama guna mencapai konsensus atau kesempatan yang terbaik untuk kepentingan yang tidak sama guna mencapai konsensus

atau kesempatan yang terbaik untuk kepentingan masing-masing pihak, dan sejumlah kebijakan serta prosedur yang bakal ditetapkan pemerintah.

5. Keadilan (Equity): Pemerintah yang baik akan memberikan kesempatan yang baik kepada laki-laki ataupun perempuan dalam usaha mereka guna menaikkan kualitas hidupnya.
6. Kata efektivitas dan efisiensi tidak dapat dipertukarkan karena memiliki arti yang berbeda, meskipun pada kenyataannya kata efisiensi dan efektivitas sering digunakan bersama-sama. Ketika membandingkan pengeluaran dan hasil, efisiensi ditekankan, tetapi efektivitas secara langsung terkait dengan pencapaian tujuan. *Efficacious* berasal dari kata efektif yang maknanya berhasil atau sesuatu yang telah diselesaikan secara memuaskan. Menurut Harbani Pasolong (2007:4) (*Isi Jurnal Pem. SDM.Pdf*, n.d.), istilah "efek" berasal dari kata "efektivitas", dan frasa ini dipakai untuk menunjukkan hubungan sebab akibat antara dua variabel. Kemampuan untuk menjadi efektif. Dapat dianggap sebagai penyebab faktor lain. Istilah "efektivitas" mengacu pada kemampuan guna mewujudkan tujuan yang dimaksudkan sebelumnya, atau dengan kata lain, pencapaian target sebagai hasil dari proses kegiatan. Menurut kamus ilmiah populer, khasiat didefinisikan sebagai kesesuaian penggunaan atau dukungan untuk tujuan tertentu. Dari segi produktivitas, efektivitas yakni sebuah faktor yang menunjang tercapainya tujuan kerja yang maksimal, yakni tercapainya target yang dikaitkan dengan kualitas, kuantitas, dan waktu.
7. Akuntabilitas merupakan Pertanggung jawaban seseorang atau organisasi didefinisikan selaku kewajiban guna memberikan pertanggungjawaban, serta guna menjawab dan menjelaskan kinerja dan tindakannya kepada mereka yang berhak atau berwenang untuk meminta pertanggungjawaban, menurut lembaga ketatanegaraan dan keuangan Negara Republik Indonesia dan badan pengawas pembangunan (Dinata, 2017). Akuntabilitas sangat penting dalam memastikan bahwa nilai-nilai seperti efisiensi, efektivitas, ketergantungan, dan prediktabilitas dipertahankan. Akuntansi tidak abstrak tetapi nyata di alam, dan itu harus diatur oleh undang-undang melalui serangkaian proses yang sangat tepat seputar masalah yang tanggung jawab harus ditetapkan.

8. Visi Strategi (Strategic Vision): Para pemimpin dan masyarakat mempunyai perspektif yang luas juga jangka panjang mengenai penyelenggaraan pemerintah yang baik serta pembangunan manusia, bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan guna pembangunan tersebut.

Prinsip-prinsip itulah yang menempel pada suatu pemerintahan dalam rangka mewujudkan apa yang di harapkan, sehingga hubungan yang baik dengan masyarakat bisa di rasakan. Pemerintah dari dahulu sudah melaksanakan atau merencanakan sebuah program-program dalam upaya adanya pembangunan nasional baik pada jangka panjang ataupun jangka pendek.

9. Manajemen Publik yang Bercirikan Good Governance

Good governance pada bidang otonomi daerah ialah bahasa strategi sebab, pertama, kuat hubungannya terhadap berkembangnya operasionalisasi manajemen serta administrasi publik, senada terhadap sejumlah perubahan kemasyarakatan, baik pada lingkup domestik ataupun internasional. Pertimbangan kedua yakni kaitannya yang nyata dengan langkah kita guna menciptakan sistem nasional dengan daya saing tinggi dan adaptif untuk memasuki era iglobalisasi dan liberalisasi ekonomi. Pertimbangan ketiga ialah kaitannya dengan organisasi sektor publik sekarang sedang menghadapi tekanan guna lebih efisien, memperhitungkan biaya iekonomi dan biaya, sosial, serta dampak inegatif atas aktivitas yang dijalankan. Pertimbangan keempat kaitannya terhadap perubahan paradigma pembangunan, yaitu dari paradigma rule governance jadi paradigma good governance. Pada good governance peran keterlibatan masyarakat sangat mendominasi pembangunan. Pertimbangan kelima, pada kaitannya idengan bentuk organisasi birokrasi pada zaman saat ini sudah waktunya guna ditinjau lagi dan diarahkan terhadap bentuk organisasi yang terbuka atau fleksibel, ramping atau pipih (flat), efisien dan rasional, serta terdesentralisasi. Atau bahasa lainnya penyelenggaraan urusan pemerintahan sebaiknya lebih condong terhadap kapasitas dan keterlibatan masyarakat di tingkat daerah atau wilayah.

C.METODE

Pada bagian ini penulis menjelaskan penggunaan metode dalam melakukan sebuah penelitian. Tipe penelitian yang digunakan yakni deskriptif dengan metode kualitatif ialah jenis penelitian di mana peneliti sebagai instrumen utama, teknik pengumpulan data dilakukan dengan analisis data deskriptif dan hasil penelitian kualitatif lebih mengedepankan pada makna dari pada generalisasi. Penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif merupakan jenis penelitian di mana peneliti sebagai instrumen utama, teknik pengumpulan data di jalankan dengan analisis data induktif serta hasil penelitian kualitatif lebih mengedepankan pada makna dibanding generalisasi.

D.PEMBAHASAN

Penerapan prinsip-prinsip Good Governance untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di kantor Kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa :

1).Responsivitas

Responsivitas adalah suatu pertanggung jawaban dari sisi penerima pelayanan atau masyarakat. Serta masyarakat dapat mengetahui seberapa jauh penyelenggaraan pelayanan bersikap tanggap kepada persoalan kebutuhan, serta harapan dari masyarakat, Responsivitas pelayanan publik sangat dibutuhkan oleh masyarakat, sebab selaku bukti bahwa kemampuan organisasi publik guna memberikan pelayanan yang jadi keinginan semua masyarakat dalam sebuah negara. Pada hal ini responsibiliti yakni cara yang efisien untuk mengatur urusan baik di tingkat pusat ataupun tingkat daerah untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Dari indikator Responsivitas telah meliputi sikap serta komunikasi yang baik dari penyedia pelayanan, sikap dan komunikasi dari petugas Kantor Kecamatan Maronge dapat memberikan kesan pada penerima layanan yaitu masyarakat, sikap yang baik, ramah dan sopan yang di berikan oleh petugas kecamatan akan membuat masyarakat merasa nyaman dan akan di terima secara baik.

Jadi, pada indikator responsivitas telah mencakup sikap yang baik, ramah serta sopan dan komunikasi yang baik dari penyedia layanan, sikap serta komunikasi dari petugas Kantor Kecamatan Maronge telah memberikan kesan kepada masyarakat atau penerima layanan. Dengan indikator tersebut adapun wawancara yang di jalankan oleh peneliti terhadap beberapa narasumber yakni Bapak Camat, pegawai kantor Kecamatan Maronge dan masyarakat Kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa.

“ Dalam pelayanan publik yang kami lakukan di kantor Kecamatan Maronge ini kami selalu berusaha bersikap baik, ramah, dan sopan terhadap masyarakat yang datang mengurus administrasi kependudukan atau mengurus kepentingan administrasi lainnya. Karena kami sadari bahwa keberadaan kami di Kecamatan Maronge ini adalah memberikan pelayanan yang baik serta memberikan penyambutan yang baik pula. Kami juga berusaha melakukan komunikasi yang baik dan mudah di mengerti oleh masyarakat yang melakukan pengurusan administrasi kependudukan atau kepentingan lainnya. Kami juga berusaha membangun komunikasi yang baik agar masyarakat senang datang berurusan dengan kami di kantor Kecamatan Maronge”. (Hasil wawancara dengan Bapak Camat Maronge pada 3 April 2023).



Selanjutnya wawancara dengan seorang masyarakat dari Kecamatan Maronge mengatakan bahwa:

“Selaku masyarakat saya merasa jika petugas yang ada di kantor Kecamatan Maronge berkaitan dengan sikapnya, saya merasa mereka cukup ramah dan sopan dalam menghadapi saya selama berurusan di Kantor Kecamatan Maronge.” (Hasil wawancara dengan BG pada 7 April 2023).



Sesuai dengan hasil wawancara bersama masyarakat Kecamatan Maronge di atas membuktikan, jika pegawai dari Kantor Kecamatan Maronge telah bersikap ramah serta sopan dalam melayani masyarakat yang mempunyai kepentingan di kantor Kecamatan Maronge.

2) .Efektivitas iidan iEfisien

Efektivitas dan Efisien dalam penyelenggaraan negara adalah ukuran dari kesuksesan yang di nilai dari aspek besarnya sumber daya guna meraih hasil dari kegiatan yang di laksanakan, serta sejauh mana suatu kegiatan mencapai tujuannya. Dengan indikator tersebut adapun wawancara yang di jalankan oleh peneliti terhadap beberapa narasumber yakni Bapak Camat, pegawai kantor Kecamatan dan masyarakat Kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa.

Efisien yang artinya pemberian pelayanan yang lebih cepat dan memuaskan, sementara efektivitas artinya bentuk layanan yang di inginkan oleh masyarakat sesuai terhadap pelayanan yang di berikan oleh

pemerintah. Peneliti selanjutnya mewawancarai Bapak Camat Maronge menyatakan :

“ Selaku pemimpin di kantor Kecamatan Maronge, saya berusaha agar kami bisa melakukan pelayanan terhadap masyarakat secara efektif dan efisien. Karena keberhasilan proses pelayanan yang efisien berkaitan dengan waktu dan anggaran sangat menentukan kualitas pelayanan serta kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang di berikan oleh pegawai yang terdapat di kantor Kecamatan yang saya pimpin” (Hasil wawancara dengan Bapak Camat pada 3 April 2023).

Berdasarkan hasil wawancara di atas telah di jelaskan, jika Bapak Camat selaku pemimpin dari kantor Kecamatan Maronge sudah berusaha untuk melakukan pelayanan secara efektif dan efisien kepada masyarakat. Selanjutnya peneliti mengadakan wawancara bersama salah satu masyarakat dari Kecamatan Maronge menyatakan :

“Berkaitan dengan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat di kantor Kecamatan Maronge, saya tidak terlalu paham dan mengerti karena saya tidak terlalu sering berurusan ke kantor Camat Maronge. Jadi saya akan datang ke kantor Kecamatan Maronge pada saat ada kepentingan atau urusan saja.” (Hasil wawancara dengan DI 15 April 2023).



Berdasarkan hasil dari Observasi yang di adakan oleh peneliti terhadap ke efektivitas serta efesiensi dalam melaksanakan Visi dan Misi, peneliti menilai dari kemampuan pegawai yang relatif baik dalam menjalankan tugas dan pegawai juga bisa melaksanakan Visi dan Misi yang terdapat di kantor Kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa di karenakan setiap pegawai mempunyai tugas dan fungsi sendiri-sendiri sesuai dengan yang di tetapkan.

5). Keadilan

Keadilan yakni suatu tindakan yang memberikan perlakuan yang sama terhadap setiap orang pada kondisi yang sama. Hal ini disebabkan pada dasarnya, setiap manusia itu memiliki nilai yang sama selaku manusia. Oleh sebab itu peneliti memasukkan indikator keadilan pada Implementasi prinsip- prinsip Good governance, dari indikator di atas peneliti mewawancarai beberapa narasumber yaitu Bapak Camat Maronge, Kasi Pelayanan, dan masyarakat.

“ Di dalam pemberian layanan kepada masyarakat kami berusaha berlaku adil dengan memberikan perhatian dan pelayanan yang sama kepada semua masyarakat yang berurusan di kantor Kecamatan Maronge baik masyarakat yang berasal dari luar Kecamatan Maronge maupun warga masyarakat Kecamatan Maronge sendiri. Kami tidak membedakan status sosial, gender, pangkat atau jabatan,dll. Kami memberikan perhatian yang sama kepada seluruh warga masyarakat yang berurusan di kantor kami.”(Hasil wawancara dengan Bapak Camat pada 3 April 2023).

Berlandaskan wawancara di atas bahwa pegawai kantor Kecamatan Maronge telah memberikan pelayanan yang adil untuk masyarakat tanpa membedakan status gender atau pun jabatan dari masyarakat tersebut, karena pelayanan yang adil di bangun dengan dasar kesamaan dan setatusnya sebagai penerima layanan.Selanjutnya peneliti juga mewawancarai salah satu masyarakat Kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa menyatakan :

“ Dalam saya berurusan di kantor Kecamatan Maronge belum saya temui perlakuan yang tidak

adil, artinya mereka tidak pernah memperlakukan saya berbeda dengan perlakuan terhadap orang lain”(Hasil wawancara dengan YI pada 20 April 2023)



Berlandaskan hasil wawancara tersebut salah satu dari masyarakat Kecamatan Maronge mengatakan, jika pelayanan dari kantor Kecamatan Maronge telah berlaku dalam memberikan sebuah pelayanan terhadap masyarakat dan sesuai kebutuhan yang di butuhkan oleh masyarakat. Selanjutnya peneliti mengadakan wawancara bersama salah satu masyarakat Maronge yang pernah mengurus beberapa berkas di kantor Kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa menyatakan :

“Saya mempunyai pengalaman satu kali dalam pengurusan, pada saat saya mengurus surat Kartu Keluarga, saya merasa ada perlakuan yang kurang adil. Pada saat itu saya lebih dulu memberikan surat keterangan dari desa dengan berkas - berkas lainnya. Tiba-tiba datang seseorang yang saya tidak ketahui hubungannya dengan petugas lalu menyerahkan berkasnya. Kami sama-sama menunggu dan ternyata orang tersebut terlebih dahulu di layani di bandingkan dengan saya yang datang lebih awal, saya merasa bahwa ada ketidakadilan dalam pelayanan di kantor Kecamatan Maronge”. (Hasil wawancara dengan EI pada 19 April 2023).



Sehingga ada kesan bahwa indikator keadilan belum berjalan dengan maksimal.

3) . Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah bentuk dari pertanggung jawaban individu atau suatu organisasi terhadap pihak - pihak yang berhak memperoleh keterangan mengenai kegiatan bisnis ataupun kinerja dalam melaksanakan tugas untuk meraih sebuah tujuan tertentu. Akuntabilitas merupakan sebuah indikator dari prinsip-prinsip Good governance, sebab Akuntabilitas mencerminkan kemampuan dari organisasi publik untuk melaksanakan misi dan tujuannya khususnya guna memenuhi kebutuhan dari masyarakat.

Indikator Akuntabilitas berkaitan dengan tanggung jawab terhadap masalah-masalah yang terjadi dari kelalaian yang di lakukan dalam memberikan pelayanan, kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Camat Maronge mengatakan :

“ Sebagai pimpinan di kantor Kecamatan Maronge, saya bertanggung jawab atas keberlangsungan proses kegiatan yang telah di tetapkan berdasarkan aturan-aturan atau SOP yang ada. Saya selalu tekankan terutama kepada kepala seksi di setiap bidang supaya bisa bertanggung jawab atas segala yang menjadi tupoksi (tugas pokok) masing-masing dan saya tetapkan agar seluruh seksi

yang memberikan laporan secara berkala berhubungan dengan beban kerja yang di berikan kepada setiap seksi, karena saya juga selaku Camat akan tetap memberikan laporan pertanggung jawaban kepada Bapak bupati”(Hasil wawancara dengan Bapak Camat Maronge pada 3 April 2023).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat di simpulkan, jika ada masalah yang terjadi dampak atas kelalaian pegawai, maka semua pihak kantor Kecamatan Maronge harus bertanggung jawab mulai dari Camat hingga pegawai yang ada di kantor Kecamatan Maronge tersebut. Lalu peneliti juga melakukan wawancara bersama masyarakat dari kantor Kecamatan Maronge:

“ Jika di tanya berkaitan dengan tanggung jawab para pegawai yang ada di kantor Kecamatan Maronge, saya tidak dapat memberikan penilaian karena saya tidak terlalu sering untuk komunikasi dengan mereka. Tetapi saya tidak pernah mendengar ataupun melihat masyarakat melakukan protes yang keras terhadap kinerja mereka ” (Hasil wawancara dengan YI pada 20 April 2023).

Dari keseluruhan hasil wawancara pada indikator Akuntabilitas tentang kelalaian pada pelayanan dapat bisa dinyatakan, jika Akuntabilitas sudah di jalankan secara baik di karenakan Bapak Camat beserta pegawai Kantor Kecamatan Maronge dapat bertanggung jawab atas kelalaian yang terdapat di kantor Kecamatan Maronge. Serta masyarakat menilai bahwa pegawai telah bertanggung jawab dengan tugas yang telah di bagikan sesuai dengan bidangnya masing- masing.

4) . Transparansi

Keterbukaan publik sejatinya ialah wujud transparansi yang berimplikasi terhadap kemampuan dari pemerintah dalam menciptakan Good governance. Salah satu contohnya seperti pemerintah bisa memberikan informasi tentang aturan main dan rincian dari wujud kegiatan pelayanan publik dengan jelas, maka masyarakat bisa berperan serta mengawasi ke dalam kegiatan pemerintah itu dengan langsung.

Dengan Indikator Transparansi di atas peneliti melakukan wawancara kepada empat narasumber yaitu Bapak Camat Maronge, pegawai Kecamatan Maronge serta masyarakat Kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa .

Transparansi di dalam pelayanan publik merupakan penyelenggaraan pelayanan yang bersifat terbuka, maka masyarakat bisa mengetahui proses pelayanan dengan mudah serta jelas. Lalu peneliti melakukan proses wawancara dengan Bapak Camat Maronge :

“ Dalam hal keterbukaan informasi atas segala hal yang harus di ketahui oleh masyarakat umum,kami selalu menginformasikan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bertanya atas apa yang ingin di ketahui. Karena kami rasa, jika masyarakat mudah mengakses informasi dari kami dan komunikasi menjadi lancar maka akan memberikan kemudahan pula pada kami dalam menyelesaikan urusanya”. (Hasil wawancara dengan Bapak Camat Maronge pada 3 April 2023).

Berdasarkan hasil wawancar peneliti dengan Bapak Camat Maronge beliau menjelaskan bahwa keterbukaan informasi mengenai persyaratan yang di butuhkan oleh masyarakat dalam pengurusan administrasi telah berjalan relatif baik di karenakan Bapak Camat Maronge telah memberikan informasi apa saja yang mesti di bawa dalam menjalankan pengurusan administrasi kependudukan, kemudian peneliti melakukan wawancara bersama salah satu masyarakat dari kantor Kecamatan Maronge menyatakan:

“Menurut saya kantor Kecamatan Maronge kurang terbuka dengan informasi, karena tidak terdapat papan informasi atau papan pengumuman. Hal ini sangat di butuhkan agar kami masyarkat yang datang ke kantor Kecamatan Maronge untuk berurusan bisa mendapatkan informasi dengan tanpa bertanya-tanya kepada petugas dan merepotkan petugas serta bisa lebih terbuka

informasinya”. (Hasil wawancara dengan DI pada 15 April 2023)

Dalam beberapa hari saya telah melakukan Observasi di Kantor Kecamatan Maronge ternyata papan informasi di Kantor Kecamatan Maronge terdapat di samping kantor Camat (Hasil Observasi pada 18 April 2023).

Sehingga menurut saya , papan informasi seharusnya di pasang atau di letakkan di depan kantor Kecamatan atau di tempat terbuka agar masyarakat mudah dalam mengetahui informasi terbaru yang ada di kantor Kecamatan Maronge, di karenakan hal inilah yang menyebabkan pegawai atau staf dari Kantor Kecamatan Maronge terkesan kurang transparan atau terbuka kepada masyarakat.

E . KESIMPULAN

Sesuai dengan hasil analisa dari penelitian berjudul Penerapan prinsip-prinsip Good Governance dalam pelayanan publik di kantor Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat di simpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan prinsip-prinsip Good governance untuk meningkatkan pelayanan publik di kantor Kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa di lihat dengan beberapa indikator antara lain : Indikator Responsibilitas di laksanakan cukup baik di kantor Kecamatan Maronge, di lihat dari sikap pegawainya yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sopan, ramah dan menggunakan cara komunikasi serta bahasa yang baik dan mudah di pahami masyarakat sebagai pengguna layanan, dan jika perlu mereka menggunakan bahasa daerah Sumbawa. Prinsip Efektivitas dan Efesien belum terlaksana secara baik sebab masih ada oknum pegawai yang masih belum disiplin dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Secara umum prinsip keadilan dalam pelayanan di kantor Kecamatan Maronge berjalan cukup adil. Tetapi masih ada masyarakat yang merasa perlakuan pegawai belum adil terutama berkaitan dengan cepat atau lambatnya staf melayani pengguna layanan. Hal ini bisa di sebabkan karena jumlah pegawai dan sarana yang terbatas sebagaimana penjelasan dari Bapak Camat Maronge. Prinsip Akuntabilitas bisa berjalan dengan cukup baik di kantor Kecamatan Maronge sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Camat, pegawai / staf dan masyarakat. Ada seorang

masyarakat yang menyampaikan bahwa belum pernah melihat atau mendengar protes keras yang berkaitan dengan kinerja pegawai di kantor Kecamatan Maronge. Dan Prinsip Transparansi belum di terapkan secara maksima, karena masih ada masyarakat yang menginginkan keterbukaan informasi, misalnya masih ada masyarakat yang tidak mengetahui keberadaan papan informasi. Sehingga di upayakan agar papan informasi dapat di pasang di tempat yang lebih terbuka dan di isi secara rutin.

2. Terdapat dua Faktor penghambat di Kantor Kecamatan Maronge, faktor pertama yaitu kekurangan staf pada bagian Kasi (Kepala Seksi). Sehingga untuk posisi tersebut di isi oleh beberapa kasi yang ada, hal ini yang menyebabkan keterlambatan dalam proses memberikan pelayanan. Faktor kedua yaitu kekurangan dari segi fasilitas sesuai dengan pernyataan yang di sampaikan oleh Bapak Ismail selaku camat mengatakan bahwa di kantor Kecamatan Maronge memiliki kekurangan fasilitas yaitu komputer, sehingga hal ini juga menjadi penyebab keterlambatan dalam pelayanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rohman & Tunggadewi, (2019) Penerapan prinsip- prinsip Good governance dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- Along, (2020) Kualitas Layanan Administrasi Akademik di Politeknik Negeri Pontianak.
- Duarmas, D., Rumapea, P., & Rompas (2016). Prinsip – prinsip Good Governance dalam pelayanan publik di kantor camat Kormomolin kabupaten Maluku Tenggara Barat.
- DAHLAN,(2017). Pengaruh Penerapan Good governance terhadap kinerja pelayanan publik , budaya organisasi dan lingkungan eksternal sebagai pemoderasi.
- Galib et al(2018) Penerapan Prinsip Good Governance dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai di Kelurahan Muara Jawa Ilir Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegar.
- Hulu, (2018) Analisis kualitas pelayanan publik di kantor desa Redang Kecamatan Rengat Baray Kabupaten Indragri.
- Padjadjaran (2017)(Sosiohumaniora (Mewujudkan_ Good_ Governance_ Melalui_ Pelayanan_ Publik.Pdf, n.d.)
- Rahmadanita (2019) Implementasi Kebijakan Smart Government Dalam Rangka Mewujudkan Smart City Di Kota Bandung.
- Ramadani (2018) Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) (studi Kasus pada Kantor Kecamatan Rappocini Makasar.
- Sugawara & Nikaido(2014). ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.
- Susanto & Anggraini(2019) Kualitas Pelayanan Publik Pada Kantor Camat Tabir Ulu Kabupaten Merangin.
- Usman, Nurdin. 2002. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Grasindo: Jakarta.
- DUADJI NOVERMAN,Good Governance dalam Pemerintah Daerah.Vol. 28, No. 2 (Desember, 2012): 201-209
- Website : <https://sumbawakab.go.id/>
- Website : <https://www.bandungkab.go.id/uploads/Topoksi.pdf>

Jurnal Listia

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

1%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1**Submitted to LL DIKTI IX Turnitin Consortium
Part II**

Student Paper

2%**2****repository.untag-sby.ac.id**

Internet Source

1%**3****Submitted to Universitas Brawijaya**

Student Paper

1%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%





COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA
DEPARTEMEN PENERBITAN

PRAJA Observer: JURNAL PENELITIAN ADMINISTRASI PUBLIK

e-ISSN: 2797-0469, Jl. Nginden Intan Timur XV. No. 11 Surabaya, Indonesia

<https://www.aksiologi.org/index.php/praja/index>; e-mail: prajajurnal@gmail.com



PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik

1/09/2023/#1034

L.o.A

31/05/2023

Kepada

LISTIA AFLIYA

listiaafliva85@gmail.com;

ACHLUDDIN IBNU ROCHIM

didin@untag-sby.ac.id;

M. KENDRY WIDIYANTO

kenronggo@untag-sby.ac.id;

Di

Program Studi Administrasi Publik,

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,

INDONESIA

Sehubungan dengan naskah artikel ilmiah yang saudara kirimkan ke redaksi jurnal PRAJA Observer, maka dengan ini redaksi informasikan bahwa naskah anda telah diproses untuk publikasi di Jurnal PRAJA Observer. Redaksi sangat mengapresiasi kontribusi naskah anda ke jurnal PRAJA Observer. Dan redaksi telah mengambil keputusan mengenai pengajuan naskah berjudul: **PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR KECAMATAN MARONGE KABUPATEN SUMBAWA**, yang diterbitkan pada bulan September Tahun 2023: Volume 3, No. 05 (2023).

Dengan keputusan redaksi adalah: "DITERIMA"

Hormat kami,

Editor in Chief,

Kusnan

PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik

<https://aksiologi.org/index.php/praja/index>



Lampiran 5: Lembar Revisi**Lembar Revisi dewan penguji 1:**

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI

Nama : Listia Afliya

NIM : 1111900210

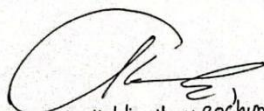
Hari/ Tanggal Ujian : Rabu, 21 Juni 2023

Catatan Perbaikan:

- Patuhi saran² dari Penguji
-

Surabaya,

Persetujuan Dosen Penguji 1 Telah Revisi/Perbaikan, Revisi dari Dosen Penguji 1,



Dr. Achuliddin Ibnu Rochim, S.H., M.S.I



Dr. Achuliddin Ibnu Rochim, S.H., M.S.I

Catatan: Bila tidak ada revisi, dosen penguji wajib menuliskan "tidak ada revisi", dan menandatangani di sebelah kanan dan kiri.

Lembar Revisi dewan penguji 2 :

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI

Nama : Listia Afliya

NIM : 1111900210

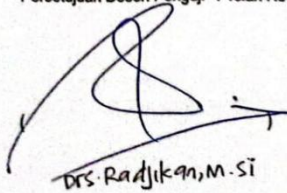
Hari/ Tanggal Ujian : Rabu, 21 Juni 2023

Catatan Perbaikan:

Lihat di skripsi.

Surabaya,

Persetujuan Dosen Penguji 1 Telah Revisi/Perbaikan, Revisi dari Dosen Penguji 1,


Drs. Radjikan, M. Si

()
Drs. Radjikan, M. Si

Catatan: Bila tidak ada revisi, dosen penguji wajib menuliskan "tidak ada revisi", dan menandatangani di sebelah kanan dan kiri.

Lembar Revisi dewan penguji 3

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA


LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI

Nama : Listia Afliya
NIM : 1111900210
Hari/ Tanggal Ujian : Rabu, 21 Juni 2023

Catatan Perbaikan:

1. Perbaiki Judul
2. Perbaiki Kerangka konseptual
3. Pembahasan kurang mendalam analisisnya
4. Perbaiki deskripsi objek penelitian
5. Perbaiki kesimpulan & saran.

Surabaya, 26 Juni 2023
Persetujuan Dosen Penguji 1 Telah Revisi/Perbaikan, Revisi dari Dosen Penguji 1,


(Dida Rahmadanik, M.AP


(Dida Rahmadanik, M.AP

Catatan: Bila tidak ada revisi, dosen penguji wajib menuliskan "tidak ada revisi", dan menandatangani di sebelah kanan dan kiri.